

PENGUATAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN ATAS PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di Bei)

Melyona Zenia Rabbil¹, Anna Fajarwaty², Suci Ayu Wulandari³

¹Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional, Politeknik Bina Madani

²³Program Studi Akuntansi, Politeknik Bina Madani

Melyona.zr@poltekbima.ac.id, Kabupaten Bekasi, Indonesia

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ROA dan Kepemilikan keluarga (KK) terhadap penghindaran pajak, dengan kondisi sebelum dan sesudah dimoderasi Dewan Komisaris Independen (DKI). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. *Tax avoidance* diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR). Dan variabel independen yang diteliti adalah profitabilitas dan kepemilikan keluarga. Penelitian ini memasukkan variabel moderasi yaitu dewan komisaris independen. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dengan tahun pengamatan selama 5 tahun (2010-2014), jadi total data sampel berjumlah 60. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Analisa data menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan *moderate regression analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan KK berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil dari interaksi moderasinya ROA berpengaruh signifikan positif dan KK berpengaruh signifikan negatif.

Kata kunci: Profitabilitas (P); Kepemilikan Keluarga (KK); Dewan Komisaris Independen (DKI); Penghindaran Pajak (PP).

Abstract. This study aims to analyze the impact of ROA and family ownership on tax avoidance in conditions before and after a moderated independent commissioner. In this study, tax avoidance is the dependent variable. Tax avoidance is measured using the Effective Cash Rate (CETR). And the independent variables studied are profitability and family ownership. The coordinating variable for this study is an independent commissioner. The sample for this experiment includes more than 12 companies that manufacture the automotive subsector and has been observed for 5 years (2010-2014), so the total sample of data is 60. The sample was selected using a targeted sampling method. Hypothesis testing using data analysis using classical assumptions and moderate regression analysis (MRA). The results of this study show that ROA and family ownership have a significant negative impact on tax avoidance, while the consequences of mitigation ROA interactions have a positive and significant impact, and family ownership is the examiner's job. It has been shown to have a significant negative impact on quality. The subjects of this survey are external government auditors working at the BPKRI West Sumatra Representative Office. The entire population of this survey is a sample. This survey uses primary data from responses from up to 45 accountants to analyze the survey. The analytical technique used is Structural Equation Modeling (SEM) using a smart partial least squares version 3.0 application with an error rate of 5%. The results of the survey show that work experience, professional care, and time budget pressures have a significant impact on the quality of the auditor's work, and the location of the inspection does not have a significant impact on the quality of the auditor's work.

Keywords: Profitability (P); Family Owners (FO); Independent Commissioner (IC); Tax Avoidance (TA)

Pendahuluan

Pajak adalah penyumbang pendapatan negara yang paling besar diantara sumber pendapatan lainnya, hal ini dapat dibuktikan dimana pada tahun 2015 pajak menyumbang 1.379.922 milyar rupiah atau berkisar 76,9% dari total pendapatan Negara (bps.go.id, 2015). Didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 11 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa "Pendapatan negara terdiri dari atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah". Fungsi utama pajak adalah sebagai budgeter, dimana pajak dipergunakan sebagai alat memasukan dana secara optimal ke kas negara. Selain itu, fungsi tambahan dari pajak yaitu dimana pajak digunakan terhadap pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang dalam pelaksanaannya bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum (Waluyo dan Wiraman, 2002 :8).

Perencanaan pajak yang tidak bertentangan secara Undang-Undang disebut sebagai "Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)". Salah satu definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksud oleh hukum pajak (Brown, 2012). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan pajak (*tax avoidance*) (Barr, 1997). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, namun kegiatan ini akan memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain adanya penetapan suatu denda, dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik atau investor. Penghindaran pajak perusahaan di definisikan sebagai transaksi atau kejadian baik pasif maupun agresif yang mengarah pada pengurangan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan (Dyrenge et al., 2008). Di satu sisi, penghindaran pajak juga dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan dari strategi perencanaan pajak. Dan dalam rangkaian strategi perencanaan pajak, terdapat istilah lain dari penghindaran pajak seperti ketidakpatuhan (*noncompliance*), penggelapan (*evasion*), agresivitas (*aggressiveness*), dan penyembunyian (*sheltering*).

Di Indonesia, fenomena terjadinya penghindaran pajak seperti ini, juga terlihat pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diidentifikasi melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2015). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 terdapat 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Dan perusahaan tersebut pada umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2015). Sehubungan dengan Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar 1.822,5 triliun rupiah, dimana target dari penerimaan perpajakan itu sendiri sebesar 1.546,7 triliun rupiah, dan maraknya praktik penghindaran pajak, pada bulan Agustus 2016 pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi), menetapkan suatu kebijakan dibidang perpajakan yakni Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dengan ketentuan tarif yang telah diatur dengan tujuan untuk menekan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang masih marak terjadi saat ini. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana terlihat keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk meminimumkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (puspita, 2014).

Semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara

sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak lainnya untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan, (Ibnu Wijaya, 2014).

Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Selain itu, mendirikan perusahaan keluarga juga menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antar pemegang saham besar dan minoritas, dan konflik keagenan yang lebih kecil antar pemilik dan manajer. Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (Sari dan Martani, 2010).

Masalah keagenan dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatannya. Menurut (Sari dan Martani, 2010) perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian (Chen et al. 2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan petugas pemeriksa pajak.

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai 2014. Industri manufaktur merupakan industri dengan jumlah perusahaan terbanyak dibandingkan industri lainnya (Kamil dan Herustya, 2012). Oleh karena itu, perusahaan manufaktur diduga lebih banyak melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan perusahaan non-manufaktur. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2010:62). Adapun dalam pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteris tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya agar diperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian atau dengan bahasa lain *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu, pengambilan data yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan dalam teknik pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, tapi dengan teknik pertimbangan (*judgement sampling*).

Riset ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode kepustakaan yang merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantono dan Supomo, 2002:150). Peneliti dapat memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan melalui media buku, jurnal, skripsi, thesis, internet maupun media lain yang berkaitan dengan profitabilitas, struktur kepemilikan keluarga, struktur dewan komisaris independen serta penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selanjutnya seluruh data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari www.idx.co.id dan laporan tahunan yang dipublikasikan secara lengkap di bursa efek Indonesia (BEI), website perusahaan maupun data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran mengenai nilai *minimum*, *maximum*, *mean* dan *std.deviation*. Melalui nilai tersebut dapat diketahui bagaimana keadaan suatu perusahaan. Berikut ini ada hasil olahan statistik diskriptif melalui pengujian SPSS.

Tabel I. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 : ROA	60	,001	,240	,08003	,057739
X2 : KK	60	,119	,957	,51690	,206113
M : DKI	60	,250	,500	,36705	,052906
Y : CETR	60	,101	,870	,28363	,167530
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Diolah

Keterangan :

- ROA : Return On Asset proksi dari profitabilitas, variabel X1
- KK : Kepemilikan Keluarga, variabel X2
- DKI : Dewan Komisaris Independen, variabel moderasi (M)
- CETR : Tax Avoidance (Y)

Berdasarkan hasil 60 olah data sampel dengan SPSS versi 20, statistik deskriptif pada tabel 4.3, memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Return On Asset (ROA) memberikan gambaran total aktiva yang digunakan dalam operasional 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014, hanya mampu menghasilkan profitabilitas rata-rata sebesar 0,8003 atau 8,00%. kemudian juga terlihat nilai minimum profitabilitas menunjukan sebesar 0,001 atau sebesar 0,1%, dan nilai maksimum profitabilitas sebesar 0,240 atau sebesar 24% dengan nilai *standard deviation* sebesar 0,057739 atau 5,77%, artinya dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014, terdapat perusahaan yang mampu mengelola seluruh aktiva sehingga menghasilkan nilai profitabilitas maksimal sebesar 0,240 atau 24% yakni PT. Selamat Sempurna, Tbk pada tahun 2014. Sedangkan nilai minimum adalah menggambarkan perusahaan yang hanya mampu menghasilkan profitabilitas $\leq 0,1\%$ adalah PT. Prima Alloy Steel, Tbk pada tahun 2010 dan PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk pada tahun 2012 dan 2014. Nilai *standar deviation* sebesar 5,77% artinya 12 perusahaan data sampel pada periode 2010-2014 masih memiliki kinerja yang cukup baik, karena hanya terdapat 2 dari 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 yang mampu mengelola seluruh aktiva dengan menghasilkan profitabilitas sebesar $\leq 0,10\%$.
2. Kepemilikan Keluarga memiliki nilai rata-rata 0,51690, dimana nilai rata-rata dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 menggambarkan besaran kepemilikan keluarga sebesar 51,69%, kemudian pada tabel 4.3 menunjukan nilai minimum sebesar 0,119 atau 11,90% dan nilai maksimum sebesar 0,957 atau 95,70%, dengan nilai *standard deviation* sebesar 0,206113 atau 20,61%. Hal ini berarti dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 terdapat perusahaan yang menggambarkan kepemilikan keluarga minimum sebesar 11,90% yakni PT. Indospring, Tbk pada tahun 2013 dan 2014, dan menggambarkan maksimum kepemilikan keluarga sebesar 95,70% yakni PT. Astra Otopart, Tbk pada tahun 2010 dan 2011. Nilai *standar deviation* sebesar 20,61% artinya dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 masih memiliki kinerja yang cukup baik, karena

hanya terdapat 1 dari 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 yang memiliki saham kepemilikan keluarga sebesar $\leq 11,90\%$.

3. Keberadaan Dewan Komisaris Independen pada tabel 4.3 memperlihatkan nilai rata-rata sebesar 0,36705, hal ini menunjukkan dari sisi keberadaan Komisaris Independen dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 adalah sebesar 36,96%. Nilai minimum sebesar 0,250 atau sebesar 25% dan nilai maksimum sebesar 0,500 atau 50% dengan *standard deviation* dewan komisaris independen menunjukkan sebesar 0,052906 atau sebesar 5,29%, artinya dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 terdapat perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen sebesar 25,% yakni PT. Nippress,Tbk pada tahun 2012, dan terdapat perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen sebesar 50% yakni PT. United Tractor,Tbk pada tahun 2010. Sedangkan Nilai *standar deviation* sebesar 5,29% artinya dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 masih memiliki besaran dan jumlah struktur komisaris independen yang cukup baik, karena hanya terdapat 1 dari 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 yang memiliki besaran dan jumlah komisaris independen sebesar $\leq 25\%$. Hal ini merujuk pada teori yang dipaparkan sebelumnya pada bab 2, dimana syarat besarnya dewan komisaris independen sekurang-kurangnya dalah 30% dari jumlah komisaris.
4. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) yang diproksikan dengan CETR memiliki nilai rata-rata 0,28363, hal ini menunjukkan rata – rata pembayaran pajak 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 adalah sebesar 29,85% dari laba sebelum pajak. Nilai minumum sebesar 0.101 atau sebesar 10,10% dan nilia maksimum sebesar 0,870 atau sebesar 87 % dengan besaran nilai *standard deviation* sebesar 0,167530 atau sebesar 16,75% artinya dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 terdapat perusahaan yang menggambarkan kondisi pembayaran pajak sebesar 10,10% yakni PT.Astra Otopart,Tbk pada tahun 2012 dan perusahaan yang membayar pajak sebesar 87% adalah PT. Prima Alloy Steel,Tbk pada tahun 2010. Nilai *standar deviation* sebesar 16,75% artinya dalam 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 masih memiliki kepatuhan perpajakan yang cukup baik, karena hanya terdapat 1 dari 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 yang memiliki tingkat pembayaran pajak sebesar $\leq 10,10\%$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel bebas memiliki data distribusi normal. Data dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung seimbang. Berikut tampilan *Histogram Display Normal Curve* dan Kurva Normal P-Plot hasil olahan SPSS 20 dari penelitian ini. Selain itu pada penelitian ini dilakukan pula Uji normalitas data melalui SPSS dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov,dimana dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas ini yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Nilai hitung Sig. > 0,05), maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Nilai hitung Sig. < 0,05), maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Ghazali, 2005).

Tabel II. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,32588251
	Absolute	,070

Most Extreme Positive	,045
Differences Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z	,546
Asymp. Sig. (2-tailed)	,927

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data Tabel-4.4, terlihat hasil hitung uji kolmogorov-smirnov sebesar 0,546 dengan nilai signifikansi (sig.) 0,927 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 (**sig. 0,927 > 0,05**), atau lebih besar dari 0,10 (**sig. 0,927 > 0,10**), maka dapat disimpulkan data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Ghazli, 2005).

Tabel III. Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,725	,346		-2,097	,040		
X1 : ROA	2,696	,408	-,658	-6,611	,000	,895	1,117
X2 : KK	-,406	,221	-,181	-1,834	,072	,912	1,097
M : DKI	,697	,864	,080	,807	,423	,907	1,103

a. Dependent Variable: (Y) CETR

Sumber: Data diolah

Dari diatas, maka hasil hitung diperoleh nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dari variabel independen ROA (X1) dan KK (X2) menunjukkan sebesar 1,117 dan 1,109, dimana nilai VIF dari kedua variable tersebut **adalah < 10**. Kemudian nilai *tolerance* variabel ROA dan KK yang masing-masing menunjukkan sebesar 0,895 dan 0,912, yakni menunjukkan nilai Tolerance > 0,10. Untuk itu, dilihat dari hasil VIF dan Tolerance pada tabel, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari adanya multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. (Ghozali;2005).

Tabel IV. ANOVA

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,775 ^a	,600	,571	,302713	2,265

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian pada tabel 4.4 memperlihatkan nilai *Durbin Watson* sebesar 2,265, nilai batas atas (du) dihitung $(k;n-k) = (2;60-2) = (2;58) =$ sebesar 1,652, Maka dapat disimpulkan bahwa $T_{Hitung} > T_{Tabel}$ yakni $2,265 > 1,652$, jadi data dalam penelitian ini tidak ada terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisita (Dwi Priyanto,2008:41).

Uji Hipotesis dan Hasil Statistik

Uji Signifikansi Kelayakan Model (Uji-F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil tabel dari uji-F atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel V. Anova

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7,566	4	1,891	20,641	,000 ^b
Residual	5,040	55	,092		
Total	12,606	59			

a. Dependent Variable: (Y) CETR

b. Predictors: (Constant), KK x DKI, ROA, KK, ROA x DKI

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS, dapat dilihat tabel 4.7 menunjukkan signifikan (sig.) sebesar $0,000 < 0,050$. Selain itu nilai F_{Hitung} sebesar 20,641 sedangkan F_{Tabel} dihitung dari $d = (k;n-k) = (2;60-2) = (2;58)$ dengan banyaknya data adalah 60 dimana $\alpha = 5\%$ maka diperoleh $F_{Tabel} = 3,160$. Dengan demikian $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ ($20,641 > 3,160$). Sehingga ditarik kesimpulan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ROA dan KK secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Lubis (2007:48) Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Jika R^2 sama dengan 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Priyatno,2010). Nilai R square dikatakan baik jika diatas 0,5, hal tersebut dikarenakan nilai R square berkisar antar 0 sampai 1 . berikut hasil olah data SPSS uji koefisien determinasi (R^2) :

Tabel VI. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Coefficients^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,775 ^a	,600	,571	,302713

a. Predictors: (Constant), KK x DKI, ROA, KK, ROA x DKI

b. Dependent Variable: (Y) CETR

Sumber: Data diolah

Dari tampilan output SPSS model summary besar adjusted R^2 adalah 0,775, hal ini berarti 77,5% varian *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen ROA, KK dan DKI. Sedangkan sisanya ($100\% - 77,5\% = 22,5\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Standard error of the estimate (SEE) menunjukan sebesar 0,302713. Dimana semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Kemudian dari tabel diatas menunjukan nilai *Adjusted R square* atau koefisien determinasi adalah 0,600 yang berarti 60% *Tax Avoidance* mampu diprediksi oleh profitabilitas dan kepemilikan keluarga. Sisanya 40% oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Karena data sampel dalam penelitian ini < 100 , maka digunakan *R Square*, sehingga nilai yang digunakan sebagai koefisien determinasi adalah 60%.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VII. Uji-t (sebelum interaksi)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,725	,346		-2,097	,040
X1 : ROA	-2,696	,408	-,658	-6,611	,000
X2 : KK	-,406	,221	-,181	-1,834	,072
M : DKI	,697	,864	,080	,807	,423

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa:

1. Melihat hasil pada Tabel diatas yakni nilai signifikan (sig.) ROA yang dibawah 0,05 atau 0,10 dan hasil T_{hitung} yang lebih besar dari T_{tabel} , dapat disimpulkan bahwa variabel (X1): ROA secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel (Y): penghindaran pajak (*tax avoidance*). **Dengan demikian hipotesis H1: "ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)", diterima.**
2. Melihat hasil pada Tabel diatas yakni nilai signifikan (sig.) KK yang diatas 0,05 dan hasil $T_{hitung} < T_{tabel}$, dapat disimpulkan bahwa variabel (X2): Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y): penghindaran pajak (*tax avoidance*). **Dengan demikian hipotesis H2: "Kepemilikan Keluarga**

berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)", ditolak.

Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji MRA dengan melakukan uji interaksi dengan tingkat sig. < 0,05. Untuk itu hasil uji interaksi sebagai berikut:

Tabel VIII. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7,566	4	1,891	20,641	,000 ^b
Residual	5,040	55	,092		
Total	12,606	59			

a. Dependent Variable: (Y) CETR

b. Predictors: (Constant), KKxDKI, ROA, KK, ROAxDKI

Sumber: Data diolah

Data tabel 5.0 menunjukkan nilai sig. 0,000 < 0,050, sehingga dapat disimpulkan terjadi interaksi pada model penelitian ini, dimana Dewan Komisaris Independen (DKI) berlaku sebagai variabel moderating atas interaksi variabel independen ROA (X1) dan KK (X2) terhadap variabel dependen *Tax Avoidance*.

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi maupun uji selisih nilai mutlak mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel dan hal ini akan menyalahi asumsi klasik (Ghozali, 2006:164). Untuk itu harus dapat dipastikan kembali pada data penelitian apakah terbebas dari multikolinieritas, sehingga uji interaksi dapat dilakukan. Berikut tabel dari hasil uji yang dilakukan:

Tabel XI. Uji-t (Setelah Interaksi)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,046	,192		,238	,813
X1 : ROA	-7,518	1,368	-1,836	-5,495	,000
X2 : KK	,731	,671	,326	1,089	,281
Interaksi1 : ROA x DKI	28,061	7,688	1,335	3,650	,001
Interaksi2 : KK x DKI	-3,675	2,015	-,579	-1,824	,074

a. Dependent Variable: (Y) : CETR

Sumber: Data diolah

Dapat dijelaskan hasil pengujiannya MRA sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, Dewan Komisaris Independen (DKI) dinyatakan mampu memoderasi hubungan ROA terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni dengan hasil signifikan positif. Kemudian dikarenakan hasil dari interaksi1 adalah signifikan positif, berbeda dengan hipotesis H1.a : " ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ketika dimoderasi oleh DKI " maka **disimpulkan**

bahwa hipotesis H1.a ditolak. Dan karena variabel interaksi¹ bersifat *quasi moderator*, berarti memungkinkan adanya variable moderator lain selain dewan komisaris independen yang mampu berperan sebagai pemoderasi.

2. DKI bersifat Moderasi Potensial (Homologiser Moderator) Karena hasil dari interaksi² bernilai tidak signifikan, maka disimpulkan bahwasannya **hipotesis H2a : “Kepemilikan Keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) ketika dimoderasi oleh DKI”, ditolak.**

ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Nilai signifikan negatif pada hipotesis H1, diartikan bahwasannya jika profitabilitas yang diprosikan dengan ROA mengalami peningkatan, maka tindak penghindaran pajak (tax avoidance) akan menurun. Maksudnya apabila profitabilitas dari 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014, mengalami peningkatan, maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen justru akan menurun. Kemampuan manajemen dalam mengelola seluruh total aktiva secara efektif dan efisien, maka akan mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi, dimana secara otomatis tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Pada kondisi seperti ini, secara umum perusahaan tidak berada pada situasi kesulitan keuangan. mereka memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam praktik perencanaan pajak (tax planning) yang tidak melanggar aturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, hal ini yang mendorong pihak manajemen untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance), sehingga value positif perusahaan dapat dipertahankan dihadapan para investor, dan reputasi baik dihadapan pemerintah sebagai regulator.

Kepemilikan Keluarga (KK) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Kepemilikan Keluarga (KK) pada 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 tindak mampu menurunkan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya pada bab 2, dimana perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga yang tinggi, maka cenderung dalam jangka panjang ingin mewarisi kepada generasi keturunannya, sehingga menuntut pihak manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak agar menjaga reputasi positif perusahaan dihadapan para investor dan pemerintah selaku regulator.

ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) ketika dimoderasi oleh DKI.

Pada 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 besaran dan jumlah DKI menunjukkan sebesar 99,83%, artinya dari 12 perusahaan sampel dalam penelitian, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang keberadaan jumlah dewan komisaris independennya kurang dari 30%. Dalam penelitian ini memperlihatkan dewan komisaris independen belum secara optimal melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini tergambarkan dimana rata-rata profitabilitas yang dihasilkan pada 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 sebesar 0,08003 atau sebesar 8%, bahkan masih terdapat 2 (dua) perusahaan sampel, yang hanya mampu menghasilkan profitabilitas jauh dibawah nilai rata-rata yakni sebesar 0,001 atau sebesar 0,1%. Tingkat profitabilitas rendah inilah yang menyebabkan perilaku manajemen cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak, ditambah motivasi manajemen yang selalu dinilai baik atau buruknya kinerja diukur dari tingkat besarnya laba bersih yang dihasilkan

Kepemilikan Keluarga (KK) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ketika dimoderasi oleh DKI.

Hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis H2a pada variabel interaksi² memperlihatkan nilai yang tidak signifikan, dapat diartikan bahwa kepemilikan keluarga pada 12 perusahaan sampel pada periode 2010-2014 jika dimoderasi oleh variabel DKI ternyata tidak berpengaruh terhadap praktik tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan. Jumlah KK sebesar 51,69% yang diimbangi oleh jumlah rata-rata keberadaan dewan komisaris independen sebesar 36,71% melebihi dari minimal yang disyaratkan oleh aturan BEI yakni sebesar 30% dari jumlah seluruh komisaris, tidak menjamin akan mampu menurunkan tindak penghindaran pajak.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut yaitu Perusahaan yang mampu mengelola total assetnya dengan baik dengan menghasilkan tingkat profitabilitas tinggi, ternyata mampu mendorong pihak manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas tinggi jika diimbangi dengan keberadaan dewan komisaris independen dengan besaran dan jumlah minimal 30% dari jumlah komisaris, dengan tingkat independen yang teruji, maka akan mampu menurunkan praktik penghindaran pajak, namun jika tidak, kondisi sebaliknya yang akan didapati, yakni tingkat profitabilitas dan porsi dewan komisaris independen tidak akan mampu menurunkan tindak penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Kepemilikan keluarga yang tinggi pada suatu perusahaan akan membentuk motivasi kuat atas karakter pemilik untuk melipat gandakan kepemilikan keluarga (*capital ownership*) yang bersumber dari keuntungan perusahaan yang nantinya akan diubah bentuk kembali oleh mereka berupa investasi atau bentuk usaha lainnya yang berbeda. Tingginya kepemilikan keluarga yang diimbangi oleh besarnya jumlah porsi dewan komisaris independen diatas minimal 30% dari jumlah komisaris, namun jika tingkat independensi dari komisaris independen itu sendiri yang masih diragukan (memiliki hubungan istimewa), ternyata tidak mampu mendorong pihak manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen yang independensinya diragukan, lebih terpusat pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepemilikan saham keluarga saja, sehingga tidak heran keberadaan mereka yang sudah jelas memiliki hubungan istimewa justru terus langgeng. Kinerja pihak manajemen yang secara umum diukur dari tingkat profitabilitas yang dihasilkan, akan lebih mendorong pihak manajemen melakukan praktik penghindaran pajak, focus mereka adalah profitabilitas tinggi tanpa perlu membayar beban pajak tinggi. Inilah kenyataan dari para pelaku bisnis di negara kita, dimana para pemilik saham keluarga berlomba-lomba dapat melipat gandakan modal kepemilikannya, guna dirubah kembali dalam bentuk investasi lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada departemen riset penelitian dan pengabdian masyarakat Poltek Bima atas dana hibah penelitian.



Daftar Pustaka

- Brown, Karen B (2012). A comparative look at regulation of corporate tax avoidance, New York, Springer – Dordrech.
- Chen, K.P. dan Chu, C.Y.C. (2010), "International Control vs External Manipulation: A Model Of Corporate Income Tax Avoidance". *Rand Journal of Economics*.
- Dyregang, S.D. et al. 2008. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83 (1), 61-82.
- Ibnu Wijaya, (2014). "Mengenal Penghindaran Pajak". Diakses melalui <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>
- Indriantoro, dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Puspita, SR, (2014). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Skripsi*. pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 13, Padang*, hal.1 - 34.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.